

BAB 17

Pengembangan Infrastruktur Daerah Pendukung Agropolitan

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Infrastruktur yang akan menjadi perhatian dalam Bab ini, adalah prasarana/sarana jalan; prasarana perhubungan, yang meliputi angkutan darat, perkeretaapian, angkutan sungai; prasarana/sarana komunikasi; dan prasarana/sarana permukiman. Permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor prasarana tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

A. PERMASALAHAN

Prasarana/sarana jalan. Permasalahan yang dihadapi meliputi: (1) kondisi jaringan jalan poros desa, jalan kabupaten, dan jalan propinsi di dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, yang disebabkan oleh kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih, akibat alam serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemeliharaan; (2) tingkat kerusakan jalan akibat pembebanan muatan lebih dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis sosial ekonomi; (5) kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah; (6) menurunnya tingkat pelayanan prasarana jalan; (7) sistem jaringan jalan belum terhubungkan seluruhnya dalam Kabupaten Musi Rawas; (8) mekanisme pendanaan dan penanganan jalan provinsi, kabupaten, dan desa belum jelas bahkan masih mengacu kepada batas-batas administrasi wilayah, sehingga berdampak kepada sistem jaringan jalan yang belum membentuk suatu jaringan transportasi intermoda yang terpadu; (9) rendahnya sumber-sumber pembiayaan baik pembangunan baru maupun pemeliharaan jalan; dan (10) belum terhubungkannya berbagai kawasan rencana Pengembangan Agropolitan.

Prasarana/Sarana Perhubungan. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan; (2) belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem

jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan; (3) masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih; (4) kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum dan perkertaapian masih terbatas; (5) masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan baik darat maupun perkeretaapian dan angkutan sungai, *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas; (6) rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan; (7) masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; (8) masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ; (9) peningkatan pembinaan teknis transportasi di daerah, sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dibuat sistem standar pelayanan minimal dan standar teknis di bidang LLAJ serta skema untuk peningkatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan LLAJ di daerah; (10) masih rendahnya kapasitas penyediaan angkutan kereta api, baik barang maupun penumpang; (11) masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana angkutan sungai; (12) masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi Sungai dengan rencana pengembangan wilayah; dan (13) terbatasnya keterjangkauan pelayanan Angkutan Sungai.

Prasarana/sarana komunikasi. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas yang sangat beragam; (2) masih terbatasnya jangkauan jaringan komunikasi; dan belum berkembangnya pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Prasarana/sarana permukiman. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana/sarana permukiman; (2) belum tertatanya kawasan permukiman dan makin luasnya kawasan kumuh; dan persebaran permukiman yang makin menjauh akses sosial dan ekonomi.

Prasarana/Sarana Air. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) makin terbatasnya ketersediaan air baku; (2) makin tingginya pencemaran; dan (3) makin tingginya kebutuhan air akibat penambahan penduduk dan pertumbuhan industri.

B. SASARAN

Sasaran umum pembangunan prasarana/sarana jalan adalah: (1) terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan khususnya pada koridor-koridor utama di masing-masing kawasan Agropolitan dan perdesaan; dan (3) terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan.

Sasaran umum pembangunan prasarana/sarana perhubungan adalah: (1) meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan perhubungan, terutama keselamatan transportasi; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; (4) meningkatnya mobilitas dan distribusi wilayah; (5) meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan perhubungan baik antar wilayah maupun antar golongan masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan kawasan agropolitan; (6) meningkatnya akuntabilitas pelayanan perhubungan melalui pemantapan sistem transportasi wilayah dan lokal; dan (7) program rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi dan pembinaan sumberdaya manusia yang terpadu dengan program-program sektor-sektor lainnya dan rencana pengembangan wilayah.

Sasaran umum pembangunan prasarana/sarana komunikasi adalah: (1) meningkatnya akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif (di antaranya pasar, modal dan IPTEK); (2) meningkatnya promosi daerah; dan (3) meningkatnya investasi dan volum perdagangan daerah.

Sasaran umum pembangunan prasarana/sarana permukiman adalah: (1) tersedianya prasarana dan sarana permukiman, terutama di jalan-jalan poros; (2) meningkatnya permukiman masyarakat yang tertata di jalan-jalan poros; dan tersedianya ruang permukiman yang berorientasi lingkungan sehat.

Sasaran umum pembangunan prasarana/sarana air adalah: (1) tersedianya air minum dan air baku industri; (2) terpeliharanya kelestarian air baku; dan (3) tersedianya air sampai ke rumah tangga.

C. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan prasarana/sarana jalan adalah: (1) mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan; (2) mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas dan kawasan cepat tumbuh di agropolitan center dan agropolitan distrik; (3) melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan; (4) mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan berbasis kawasan, khususnya agropolitan center dan agropolitan distrik; (5) menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; dan (6) mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Arah kebijakan pembangunan prasarana/sarana perhubungan adalah: (1) pengembangan sistem perhubungan terpadu di seluruh kawasan agropolitan; (2) kebijakan pembangunan prasarana dan sarana perhubungan di seluruh wilayah dan kawasan agropolitan; (3) kebijakan untuk meningkatkan keselamatan transportasi daerah secara terpadu; (4) kebijakan untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi daerah; (5) kebijakan pembangunan transportasi yang berkelanjutan; (6) kebijakan pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah; (7) kebijakan peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi daerah; (8) kebijakan membangun dan memantapkan terwujudnya sistem transportasi wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu; (9) kebijakan untuk menerapkan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi dan peraturan pelaksanaannya; dan (10) kebijakan untuk mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial di daerah yang telah berkembang dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan prasarana/sarana komunikasi adalah: (1) peningkatan pendayagunaan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya guna mewujudkan tata-pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan efektif; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup; (2) peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi; dan terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan pembangunan prasarana/sarana air bersih adalah: (1) peningkatan ketersediaan air baku industri dan air minum; (2) peningkatan kualitas air baku industri dan air minum; dan (3) kelestarian sumberdaya air.

D. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program mempunyai tujuan untuk merehabilitasi jalan dan jembatan sehingga dapat meningkatkan fungsinya.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional (oleh UPTD);
- b. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan provinsi; dan
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan kabupaten dan desa.

2. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi jalan dan jembatan untuk mendukung perkembangan agropolitan.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan jalan Kabupaten;
- b. Peningkatan jalan ibukota kecamatan; dan
- c. Peningkatan jalan desa.

3. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Distrik Agropolitan

Program bertujuan untuk merangkai agropolitan distrik dan agropolitan center menjadi jaringan ekonomi regional.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam program adalah:

- a. Pembangunan jalan penghubung dari Batas Bengkulu – Durian Remuk - Terminal Peti Kemas – Beliti Baru – Agropolitan Center – Tugumulyo – Agropolitan Distrik Terawas;
- b. Peningkatan Jalan F Trikoyo – Lesing – Simpang – Semambang;
- c. Peningkatan jalan Simpang Semambang – SP 9 Cecar – Batas M. Enim (Pendopo);
- d. Peningkatan Jalan SP 9 – SP 3 Cecar – Batas Lahat;
- e. Peningkatan ruas Jalan Mangunharjo – Megang Sakti – Muara Megang – Karang Dapo – Rupit;
- f. Peningkatan jalan Simpang Kabu – Danau Raya – Nibung – Bingin Teluk – SP 4 Kelingi IV.a – Semeteh;
- g. Peningkatann Jalan Surulangun – Pulau Kidak – Muara Kulam – Kuto Tanjung;
- h. Peningkatan Jalan Selangit – Batu Gane – Napal Melintang;
- i. Peningkatan / Pembangunan jalan arteri primer dan arteri sekunder
- j. Peningkatan / Pembangunan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

4. Perencanaan dan Pengawasan

Tujuan program adalah untuk memetakan ketersediaan jalan dan jembatan bagi perencanaan, serta meningkatkan pengawasan dalam pemanfaatannya. Kegiatan Program ini meliputi:

- a. Perencanaan teknis dan pengawasan;
- b. Detail engineering design jembatan;
- c. Pendataan Jalan dan Jembatan Desa; dan
- d. Pendataan Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan Jembatan pada Ruas Jalan Kabupaten (K10)

5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Manusia

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia dalam pelayanan dan pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan teknik SDM;
- b. Peningkatan kemampuan PPNS dalam pengawasan penggunaan prasarana/sarana transportasi; dan
- c. Pengadaan alat kerja dan keamanan kerja.

6. Program Pembangunan Prasarana/Sarana Lalu Lintas

Program bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pengguna jalan dan menurunkan angka kecelakaan.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Rehabilitasi dan pemeliharaan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan dermaga sungai
- b. Pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi jalan, terminal type B di Simpang Nibung, Simpang Semambang, Simpang Terawas dan Megang Sakti serta Prabumulih (Muara Lakitan), dan pembangunan Terminal Petikemas di Muara Beliti, dan pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan distrik;
- c. Pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor serta perlengkapannya; dan
- d. Pengadaan kendaraan pengujian keliling kendaraan bermotor.

7. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Tujuan program adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan angkutan jalan dan sungai. Kegiatan program meliputi:

- a. Pembangunan transportasi umum perdesaan yang terpadu dan terjangkau serta berbasis masyarakat dan wilayah;
- b. Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil;

- c. Pengukuran alur sungai dari Kecamatan Rupit – Karang Dapo sampai dengan perbatasan alur sungai Kabupaten Muba;
- d. Pemasangan rambu lampu mercusuar disepanjang alur sungai dari Kecamatan Rupit – Karang Dapo sampai dengan perbatasan alur sungai dengan Kabupaten Muba;

8. Program restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan lalu lintas.

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan jalan;
- b. Peningkatan mobilitas dan distribusi daerah serta penataan sistem transportasi daerah dan wilayah (lokal);
- c. Pembinaan SDM transportasi jalan dalam disiplin lalu lintas serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan transportasi.

9. Program Pembangunan Perkeretaapian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan biaya murah dan lancar.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Perbaikan rel kereta api Lahat – Musi Rawas;
- b. Pembangunan jalur Kereta Api Kotapadang - Muara Beliti (Durian Remuk); dan
- c. Pembangunan terminal petikemas

10. Program Pembangunan Angkutan Sungai

Program bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat terpencil yang belum dilayani angkutan darat.

Kegiatan program ini meliputi:

- a. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai; kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah pembangunan dermaga pelabuhan sungai yang belum ada dan memperbaiki serta meningkatkan kapasitas pelabuhan sungai yang sudah ada;

- b. Pengembangan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai; Kegiatan yang dilakukan adalah pengerukan sungai yang sudah mendangkal agar dapat memperlancar angkutan sungai;
- c. Restrukturisasi dan reformasi kelembagaan angkutan sungai; dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan keterpaduan pelayanan agar lebih efektif dan efisien melalui: penataan sistem jaringan transportasi darat antarmoda secara terpadu dengan jaringan lintas angkutan sungai; koordinasi perencanaan dan penataan sistem jaringan pelayanan terpadu antara lintas darat dengan sungai; pengelolaan prasarana dan sarana angkutan sungai; perencanaan pembangunan transportasi sungai terpadu dengan program penghijauan dan lingkungan hidup, program kebersihan sungai, irigasi dan SDA, program pariwisata, dan pembukaan kerjasama pendanaan investasi Pemda dan Pusat dalam penyediaan prasarana dan sarana angkutan sungai.

11. Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Tujuan program adalah untuk mengembangkan teknologi aplikatif transportasi bersifat lokal spesifik.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transportasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda;
- b. Penyusunan program monitoring dan evaluasi;
- c. Operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja perjalanan

12. Program Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Informasi dan Komunikasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aplikasi teknologi dalam manajemen transportasi dan komunikasi.

Kegiatan utama yang akan dilakukan adalah:

- a. Penyelesaian penyusunan peraturan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya;

- b. Peningkatan porsi industri daerah melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi *mass product*;
- c. Pengembangan aplikasi *e-governrment*;
- d. Fasilitasi penyediaan komputer;
- e. Peningkatan penggunaan *open source system* ke seluruh institusi pemerintahan daerah dan lapisan masyarakat;
- f. Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, kependudukan, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi

14. Program-Program Pembangunan Perumahan

Tujuan program untuk mencapai adalah untuk menata permukiman masyarakat yang berorientasi pada kedekatan akses dengan sumberdaya produktif dan prasarana dan sarana kebutuhan dasar.

Kegiatan program adalah:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat;
- b. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif;
- c. Penyediaan unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah;
- d. Pengembangan permukiman di kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan distrik;
- e. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro (*small scale credit*) untuk pembangunan dan perbaikan rumah yang berbasis swadaya masyarakat;
- f. Pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
- g. Pengembangan kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman;
- h. Pengembangan tata keselamatan dan keamanan gedung;
- i. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- j. Penyusunan norma, standar, peraturan, dan manual (NSPM) dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung;

- k. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana di bidang Perumahan dan Bangunan Gedung; dan
- l. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusakan sosial.

15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dari program ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan pada desa tradisional dan desa eks transmigrasi;
- b. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada desa tradisional dan desa eks transmigrasi;
- c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran (*fire fighting system*);
- e. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- f. Penataan, peremajaan dan pengembangan kawasan;
- g. Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan; dan
- h. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang tanggap terhadap bencana.

16. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan air minum dan air limbah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan air minum dan air limbah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya. mbah.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan peran sekolah dasar dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat;

- c. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku;
- d. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan;
- e. Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mendukung pelestarian dan penjagaan kualitas air baku;
- f. Pengembangan budaya penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan;
- g. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan.

17. Program Pengembangan Kelembagaan Air Minum

Program ini ditujukan untuk melakukan penataan kembali peraturan-peraturan dan pengembangan kelembagaan yang terkait dengan pembangunan air minum dan air limbah untuk mewujudkan sistem kelembagaan dan tata laksana pembangunan air minum dan air limbah yang efektif.

Kegiatan yang dilakukan dalam program adalah:

- a. meningkatkan kerjasama BUMD dengan BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel, dan transparan;
- b. Pengembangan *water supply and wastewater fund*; dan
- c. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah.

18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) dan yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. Pembentukan Kelembagaan yang mengatur Air Bersih dan Air Limbah
- b. Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL yang berpredikat WTP (Water Treatment Plan) di kawasan Perkotaan dan Agropolitan;
- c. *Capacity building* bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan;

- d. Revisi peraturan mengenai struktur dan penentuan tarif;
- e. Penurunan kebocoran melalui penggantian pipa bocor dan berumur, penggantian pipa air, penegakan hukum terhadap sambungan liar (*illegal connection*), peningkatan efisiensi penagihan;
- f. Peningkatan operasi dan pemeliharaan Air Bersih;
- g. Penurunan kapasitas tidak terpakai (*idle capacity*);
- h. *Refurbishment* terhadap sistem penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun;
- i. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah;
- j. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat;
- k. Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota-kota dan kawasan Agropolitan;
- l. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- m. Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum;
- n. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional untuk pembangunan Pengolahan Air Siap Minum dan PDAL;
- o. Perbaiki prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi Agropolitan.

19. Program Pemberdayaan Masyarakat bidang persampahan dan drainase

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan persoalan persampahan dan drainase dengan sasaran adalah berkurangnya timbunan sampah, menurunnya perambahan terhadap sungai, saluran drainase, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan dan drainase.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai sasaran khusus tersebut antara lain:

- a. Kampanye penyadaran publik (*public awareness campaign*) mengenai 3R (*reduce, reuse, recycle*);
- b. Pemasyarakatan struktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase;

- c. Proyek percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos;
- d. Kampanye penyadaran publik (*public awareness campaign*) mengenai perlunya saluran drainase dalam mengurangi genangan;
- e. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan kumuh ;
- f. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan.

20. Program Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mencapainya antara lain:

- a. Review dan revisi peraturan yang terkait dengan persoalan persampahan dan drainase;
- b. Penyusunan naskah akademik rencana undang-undang persampahan;
- c. Penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak penanggulangan sampah secara daerah;
- d. Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penanganan persampahan dan drainase;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

21. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain;

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparat maupun pegawai institusi yang menangani persampahan dan drainase;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan;
- c. Pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik;
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standar *sanitary landfill system* untuk kota-kota Agropolitan;
- e. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase;
- f. Penegakan hukum terhadap permukiman liar yang memanfaatkan lahan di jaringan drainase;
- g. Peningkatan dan normalisasi saluran drainase;

- h. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota-kota kecamatan dan Kawasan Agropolitan;
- i. Peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan drainase primer dan sekunder;
- j. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase;
- k. Perbaikan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru;
- l. Penyediaan sarana angkutan persampahan.